

GEREJA DAN REKONSTRUKSI RUANG EKOLOGIS
(TINJAUAN PERAN GEREJA DALAM WACANA
PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN)

Oleh: Heribertus Solosumantro

(Mahasiswa Semester II di STFK Ledalero)

Abstrak: Tulisan ini bertujuan untuk menjelaskan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi era modern saat ini membawa suatu perubahan yang kompleks dalam pembangunan peradaban manusia saat ini. Manusia yang lahir bersama kemajuan teknologi menempatkan diri dalam suatu sikap dan cara pandang yang cenderung merusak relasi persaudaraan manusia dengan lingkungan tempat tinggalnya. Kompleksitas perubahan itu juga membentuk suatu paradigma untuk tidak peduli pada lingkungan karena kuasa teknologi telah menggantikan eksistensi manusia di hadapan publik saat ini. Hal itu tentu berbanding terbalik dengan situasi Gereja yang sulit menempatkan diri karena kemerosotan kualitas ruang ekologis yang notabene adalah akar kehidupan umat manusia. Oleh karena itu, melalui studi kepustakaan tulisan ini menyoroti peran Gereja secara semestinya dengan memaksimalkan peran gandanya dalam menyikapi realitas pembangunan yang tumpah tindih dan kurang bersahabat. Pertama, Gereja menjadi “obat” manusia kembali kepada alam dan kedua, Gereja mesti adaptif dalam menciptakan kuasa teknologi yang menghidupkan pembangunan manusia modern saat ini. Tulisan ini memosisikan dua hal pokok; dialog rekontruksi ekologis antara Gereja, masyarakat sosial dan pemerintah serta pendidikan ekologi. Dua hal ini dilihat sebagai upaya Gereja dalam merekonstruksi ruang ekologis untuk sebuah pembangunan yang berkelanjutan.

Kata kunci: Gereja, Ruang Ekologis, Pendidikan Ekologi, Dialog.

Pengantar

Panggilan hidup manusia dewasa ini mengundang serentak mendongkrak pemahaman akan eksistensi manusia sebagai *animal rationale* di tengah perubahan ruang ekologis yang semakin kompleks. Pemahaman yang sedari awal menentukan posisi strategis manusia sebagai subyek utama dalam merawat dan menciptakan ruang ekologis yang kondusif menjadi terhenti karena panggilan untuk menempatkan diri sebagai subyek juga memberi ruang bagi manusia untuk cenderung merusak, menjarah dan mengeksploitasi ruang ekologis secara ilegal. William Chang dalam bukunya yang berjudul *Moral Lingkungan Hidup* menjelaskan tesis perubahan lingkungan hidup dengan sebuah pemikiran kritis bahwa kerusakan lingkungan yang terjadi bukanlah semata-mata masalah fisik melainkan juga menghinggapi pembangunan ekologi yang berakhlak.¹ Ruang ekologis diciptakan tak sekadar menjadi faktor utama pemenuhan kebutuhan pokok hidup manusia tetapi lebih dari

itu memberi ruang manusia ekologis yang bertanggung jawab terhadap pembangunan moral hidup manusia.

Merosotnya sikap tanggung jawab manusia terhadap eksistensi ruang ekologis yang signifikan menggambarkan suatu situasi yang menunjukkan bahwa kualitas manusia dalam hal mengapresiasi sekaligus mengkritisi pembangunan ekologi era dewasa ini mengalami kemerosotan moral yang maksimum. Dua faktor utama yang menyebabkan degradasi nilai manusia di hadapan ruang ekologis era modern ini adalah kurangnya pemahaman manusia mengenai pentingnya memiliki pengetahuan yang luas mengenai isu-isu kritis lingkungan dan kurang terbukanya cara pandang sehingga cenderung melihat isu-isu lingkungan hanya sebagian kecil lingkungan yang ditinggalinya saja.²

Perubahan yang cenderung destruktif ini nampak dalam mengalirnya masalah-masalah ekologis di ranah publik dengan intensi-intensi yang memamerkan kekuasaan privat kaum elite tanpa batasan yang memenuhi kriteria kesejahteraan masyarakat. Sebagai contoh, masalah Hutan Bowosie di Labuan Bajo yang telah mengubah 400 hektare bagian hutan untuk kepentingan investasi pariwisata yang mementingkan kepentingan sebagian pihak saja.³ Selain itu, permasalahan geotermal Wae Sano yang berdampak pada rusaknya ekosistem dan renggangnya relasi sosial-budaya masyarakat sekitar Wae Sano dengan Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat.⁴ Hemat penulis, kerusakan ekologis yang diciptakan memengaruhi keseimbangan perkembangan pembangunan kehidupan manusia baik dalam jangka pendek, menengah, maupun jangka panjang.

Degradasi kesadaran manusia dalam menciptakan ruang ekologis yang kondusif mengundang partisipasi aktif Gereja sebagai “akar” pembangunan ekologis yang adil, seimbang dan berbau kemanusiaan. Gereja melalui ensiklik *Laudato Si* menarasikan bagaimana peran utama Gereja dalam membentuk, merawat, memelihara dan menciptakan keseimbangan yang integral antara manusia dengan alam baik secara fisik maupun secara non fisik. Alam adalah sebuah kehidupan dengan sebuah kearifan lokal yang menarik

manusia pada tindakan merawat dan memelihara secara bijaksana, tanpa tindakan menguasai dan menaklukkan yang berujung pada tindakan destruktif.⁵ Keberpihakan Gereja pada usaha pembangunan yang mengedepankan keseimbangan ekologis ini menempatkan peran sekaligus tantangan pada tempat pertama. Pasalnya, usaha yang dihadapi dalam merekonstruksi tatanan struktur pembangunan telah dicemari oleh oknum-oknum intelek atau elite yang tak bertanggung jawab dalam kehidupan sosial masyarakat umum. Bahwasannya tendensi pembangunan yang destruktif itu juga berasal dari pergeseran struktur sosial dan “budaya pemiskinan” antara kalangan elite dengan masyarakat menengah ke bawah.⁶

Catatan Kritis Gereja tentang Lingkungan Hidup

Gejolak pembangunan ekologis yang mengalami masa krisis pada perkembangan peradaban manusia dewasa ini melukai peran Gereja sebagai pencetus keadilan ekologis yang sudah berdiri sejak dahulu kala. Gereja yang nampak mapan dan megah dengan pembangunan yang menjulang tinggi tak sejalan dengan perkembangan peradaban manusia yang berjalan stagnan. Kekuasaan manusia pada alam yang bercorak menaklukkan secara radikal mengharuskan Gereja melihat kembali makna konstruksi ekologis manusia di tengah perubahan yang semakin kompleks.

Realitas bumi sebagai tempat tinggal makhluk hidup sebenarnya tidak boleh menenggelamkan akal dan perasaan manusia pada tempat yang salah. Dalam catatan Paus Paulus VI, Gereja mendapatkan bencana ekologis sebagai “akibat tragis” aktivitas manusia yang tidak terkendali.⁷ Manusia terjerumus dalam sistem kekuasaan yang dibarengi perubahan industri tanpa memikirkan kepentingan makhluk hidup lainnya yang juga memerlukan alam untuk mencapai proses perkembangan peradaban yang saling menguntungkan. Pada titik ini, dapat dibaca bahwa eksistensi manusia kuat didominasi oleh rasionalitas ekonomis dan bertendensi pada munculnya sikap egoisme sempit yang tak terbendung.

Perbandingan kekuatan manusia yang semakin konsumtif menjarah alam dengan penurunan kualitas keterampilan memanfaatkan kekayaan alam juga memacu panggilan Gereja menilik masalah-masalah ekologis secara serius. Paus Yohanes Paulus II menyerukan suatu pertobatan ekologis dengan pendekatan antroposentris yang melibatkan pembangunan ekologi manusia di dalamnya.⁸ Manusia mesti keluar dari sarang kecemasan karena perubahan masif baik dalam hal gaya hidup, pola-pola produksi dan konsumsi maupun karena bergesernya struktur-struktur pemerintahan dari satu tangan penguasa ke penguasa yang lainnya. Alam sebagai manifestasi kehidupan yang kompleks perlu mendudukkan diri pada suatu daya pengembangan sekaligus inovasi suatu sistem kehidupan yang bermoral dan bernuansa kemanusiaan.

Paus Fransiskus yang melihat alam sebagai saudari juga menegaskan jeritan alam karena segala kerusakan yang telah manusia timpakan pada alam, tanpa tanggung jawab manusia dalam penggunaan dan penyalahgunaan kekayaan yang telah diletakkan Allah di dalamnya.⁹ Catatan yang lahir dalam ensiklik *Laudato Si* sebagai tanggapan terbaru Gereja Katolik juga menerangkan distorsi kekuasaan manusia dengan faktor penggunaan teknologi yang memerangi keadilan manusia sebagaimana mestinya.

Paus Fransiskus menganut etika biosentrisme dan ekosentrisme dengan kearifan *ecosophy* dalam mempelajari relasi manusia dan alam.¹⁰ Secara biosentrisme, manusia kurang menyadari etika alam yang menekankan setiap kehidupan dan makhluk hidup memiliki nilai dan berharga pada dirinya sendiri. Pertama, alam memiliki nilai pada dirinya sendiri (intrinsik) yang lepas dari kepentingan manusia. Kedua, alam itu harus diperlakukan dengan kacamata moral, terlepas apakah menurut manusia ia bermanfaat atau tidak, sebab alam adalah komunitas moral.¹¹ Eksistensi manusia dalam lingkungan hidup dituntut untuk mengembangkan kewajiban moralnya terhadap alam (*reverence for life*). Secara ekosentrisme, manusia kurang menyadari bumi sebagai totalitas kehidupan.¹² Penghayatan

kehidupan manusia pada tahap ini kurang menyentuh akar terdalam realitas bumi sebagai tempat tinggal yang nyaman bagi semua makhluk hidup.

Gereja Kaum Miskin dan Wacana Pembangunan Berkelanjutan

Wacana pembangunan berkelanjutan di era digital mengetengahkan manusia pada dua pilihan; mengembangkan pembangunan industrial yang bercorak kapitalis atau merekonstruksi kembali struktur ekologi manusia yang telah mengalami pergeseran nilai seperti catatan-catatan kritis yang telah dikeluarkan oleh Gereja sejak masa-masa sebelumnya. Pergolakan ini mesti membawa manusia pada situasi merefleksikkan kembali sejarah, makna dan tujuan pembangunan ekologis yang telah dibentuk oleh peradaban manusia senja kala. Manusia modern saat ini perlu menarik diri dari keramaian dunia era pembangunan untuk melihat secara jernih ideologi pembangunan berkelanjutan yang tengah digencarkan.

Salah satu faktor yang memengaruhi pembangunan berkelanjutan adalah kemajuan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Manusia menciptakan ruang tempat ia mengekspresikan dirinya sampai lupa pada batasan kebebasan ekpresi itu sendiri. Keharusan menghadirkan teknologi sebagai operator utama pembangunan membawa suatu sistem kapitalisme yang mempermainkan hak milik kaum miskin dan tertindas. Kapitalisme global yang lahir sebagai kelanjutan dan penyempurnaan dari kapitalisme klasik yang telah dikritik oleh Karl Marx bahkan memisahkan sekat-sekat kedaulatan yang telah diciptakan oleh pembangunan ekologis masa-masa terdahulu.¹³ Keberadaan ini berbanding terbalik dengan pemikiran Bartolomeus yang tertarik pada akar etis dan spiritual masalah lingkungan, yang mengharuskan kita mencari solusi tidak hanya dalam teknologi tetapi dalam perubahan manusia.¹⁴ Perubahan yang dimaksud dalam penerapan kehidupan manusia adalah cara pandang dan pengetahuan kritis akan eksistensi ekologi manusia serta keberpihakkannya pada masyarakat miskin dan tertindas.

Gerakan Gereja kaum miskin lahir dari kecemasan serta keterlemparan masyarakat kecil dari karena situasi pembangunan yang menekan laju pertumbuhan kesejahteraan kolektif. Dalam tulisannya, Magnis Suseno menjelaskan usaha kolektif Gereja menempatkan diri bersama kaum miskin lewat konferensi atau pun usaha personal anggota Gereja. Pada tahun 1968, Paus Paulus VI mencetuskan sebuah pemikiran yang menunjukkan keberpihakan pada orang miskin karena melihat realitas sosial dan tatanan struktur sosial yang tidak berjalan adil dan seimbang.¹⁵ Term “Gereja Kaum Miskin” lahir sebagai usaha aktif Gereja memperjuangkan keadilan struktur sosial yang tidak hanya mengedepankan martabat manusia, tetapi juga membebaskan barang kepemilikan manusia yang dijarah habis oleh perindustrian yang sedang berkembang. Ironinya, kemacetan pembangunan itu masih relevan dan wacana substansial di era modern saat ini.

Solusi Alternatif: Rekonstruksi Ruang Ekologis

Kehadiran Gereja dalam praktis pembangunan ekologis adalah salah satu usaha pewartaan fundamen di tengah gejolak perubahan yang kompleks dan menyentuh realitas terdalam akan panggilan kebijaksanaan demi kebaikan bersama (*bonum communa*). Gereja yang juga mempelajari ekologi budaya di samping ekologi manusia, perlu meminta pula refleksi dan diskusi yang jujur tentang syarat-syarat untuk hidup dan kelangsungan hidup masyarakat dan kejujuran untuk mempertanyakan pelbagai model pembangunan, produksi dan konsumsi.¹⁶ Pertimbangan untuk memberi perhatian terhadap sesuatu yang menyangkut pembangunan ekologis kritis tidak hanya sampai pada tataran membentuk ruang berpikir manusia secara ekologis, tetapi juga menyadarkan umat manusia lewat tindakan praktis yang memacu kreativitas dan inovasi dalam pembangunan.

Gelombang perubahan yang terus bergerak menjauhi idealisme pembangunan berkelanjutan menuntut suatu gerakan rekonstruksi ruang ekologis dengan wacana pembangunan yang terus dibaharui dalam kesepakatan kolektif. Solusi alternatif rekonstruksi ruang ekologis dilihat sebagai upaya penarikan manusia kembali kepada alam guna

merefleksikkan model pembangunan ekologis yang adil, transparan dan relevan dengan kehidupan masyarakat menengah ke bawah. Usaha ini juga serentak menjadi modal wacana pembangunan berkelanjutan yang adaptif dengan perubahan struktur sosial-budaya kehidupan manusia itu sendiri.

Ada dua tawaran rekonstruksi ruang ekologis dengan peran ganda Gereja sebagai mediator wacana pembangunan berkelanjutan dan pembela kaum miskin dan tertindas karena ketimpangan struktur keadilan dalam ruang ekologis. Pertama, Gereja mengangkat dialog rekonstruksi ekologis baik dengan agama dan kepercayaan lain, masyarakat sosial dan pemerintah sebagai kaum elite dalam bidang politik, sosial-budaya dan ekonomi. Paus Fransiskus mengungkapkan dasar yang menjadi tumpuan dalam berdialog yaitu pertimbangan yang didasarkan pada dampak yang dihasilkan dari aneka usaha dan proyek terhadap lingkungan. Dalam dialog juga dituntut suatu proses politik yang bersifat transparan.¹⁷ Dengan dialog, manusia tidak hanya akan menambah wawasan pembentukan ruang ekologis yang terbarukan, tetapi juga tercapai suatu keputusan kolektif yang konstruktif dalam penerapan aksi revitalisasi unsur pembangunan ekologis yang adil dan transparan. Dialog lahir sebagai undangan aksi keterbukaan manusia khususnya dalam degradasi pemahaman isu-isu kritis ekologis dan cara pandang yang tendensi merusak kenyamanan komunitas global.

Salah satu bentuk dialog yang terlihat nampak dalam usaha Gereja memberikan ruang komunikasi bagi umat manusia dalam melawan atau memberikan kontribusi ide dalam memecahkan persoalan-persoalan seputar ekologis yang diwarnai oleh kerusakan baik dari segi sikap maupun aksi manusia itu sendiri. Serikat Sabda Allah (SVD) sebagai salah satu contoh komunitas yang memegang prinsip internasionalitas menaruh perhatian khusus pada isu-isu kritis ekologis dengan memainkan peran ganda baik sebagai pewarta Sabda maupun provokator pengembangan panggilan merawat alam seperti penegasan ensiklik *Laudato Si*. Hemat penulis, dialog-dialog kritis ekologi terbuka terhadap komunitas-komunitas lokal,

nasional dan internasional dengan pemanfaatan teknologi yang berbasis pada pengembangan kreativitas dan inovasi lingkungan hidup itu sendiri.

Kedua, Gereja merekonstruksi ruang ekologis melalui pendidikan ekologi.¹⁸ Kehadiran pendidikan ekologi ini ditilik sebagai upaya penanaman kekuatan karakter dalam menghasilkan suatu produk kehidupan yang memiliki konsep dan tujuan yang jelas. Penanaman konsep dan tujuan pendidikan ekologis ini pun diharapkan tak hanya sampai pada sikap dan cara pandang manusia terhadap nilai ekologi. Lebih dari itu juga menghasilkan suatu terobosan pembangunan yang berwawasan lingkungan dengan kualitas yang memungkinkan manusia tetap mengeksplorasi kekayaan alam sebagai warisan dari satu generasi kepada generasi berikutnya.

Adapun model pendidikan ekologi itu nampak dalam beragam diskusi akademik seperti seminar yang mengangkat tema ekologi, sosialisasi ekologi kebudayaan, pemanfaatan teknologi untuk pengembangan inovasi serta tradisi mengevaluasi pembangunan ekologi seturut masa pembangunan yang dijalankan. Hal ini hendak menjelaskan bahwa kekuatan rekonstruksi ekologis tidak terdapat dalam satu bidang kehidupan saja, melainkan seluruh pembangunan yang mencakup kekuatan manusia menanggapi problem ekologis, peluang teknologi menciptakan kuasa pembangunan yang konstruktif, sampai pada taraf menekan degradasi moral lingkungan hidup akibat ketidakseimbangan struktur sosial-budaya lingkungan hidup itu sendiri.

Penutup

Degradasi kualitas lingkungan hidup karena faktor aktivitas destruktif manusia sebenarnya juga memanjakan kaum kapitalis dan elite untuk menyembunyikan diri di balik layar dan terus mengeruk kekayaan alam tanpa batas. Pada situasi yang sedemikian rupa bisa dikatakan kacau, manusia mesti menarik diri dari keramaian dan membenahi sistem kehidupan yang tidak adil dan seimbang khususnya terhadap ruang ekologis. Manusia mesti merekonstruksi ruang ekologis seperti apa yang diharapkan dari idealisme ruang ekologis itu sendiri.

Kehadiran Gereja sebagai mediator sekaligus komunitas yang memosisikan diri sebagai kaum miskin dan tertindas mesti membawa umat manusia pada dua situasi yang dapat menanggalkan kepentingan personal sekaligus merekonstruksi kesadaran moral dengan mengedepankan dialog dan pendidikan ekologis guna meremajakan warisan kepada generasi yang senantiasa berguru pada perubahan dengan kekayaan yang telah tersedia. Mengutip pikiran Paus Fransiskus, kita harus menciptakan ekologi yang integral untuk memuji alam sebagai anugerah Tuhan bagi Bangsa dan dunia saat ini.¹⁹

Catatan Akhir

¹ William Chang, *Moral Lingkungan Hidup* (Jogyakarta: Penerbit Kanisius, 2001), hlm. 2.

²Vania Zulfa dkk., “Isu-Isu Kritis Lingkungan dan Perspektif Global” *JGG- Jurnal Green Growth dan Manajemen Lingkungan*, 5:1 (Jakarta: Juli 2016), hlm. 39-40.

³Joan Damaiko Udu, “Menimbang Kembali Alih Fungsi Hutan Bowosie” detiknews Jumat, 08 Oktober 2021 <https://news.detik.com/kolom/d-5758221/menimbang-kembali-alih-fungsi-hutan-bowosie>, diakses pada tanggal 20 Maret 2022.

⁴Ebed de Rosary, “Proyek Geothermal Wae Sano: Antara Penolakan, Kepentingan Pariwisata dan Pengurangan Energi Fosil” Mongabay 12 February 2022 <https://www.mongabay.co.id/2022/02/12/proyek-geothermal-wae-sano-antara-penolakan-kepentingan-pariwisata-dan-pengurangan-energi-fosil/>, diakses pada tanggal 20 Maret 2022.

⁵Sonny Keraf, “Hutan dan Wacana Pembangunan Berkelanjutan”, (Materi yang disampaikan dalam Seminar Nasional dalam Rangka Hari Hutan Sedunia via online di STFK Ledalero, 21 Maret 2022), hlm. 12.

⁶Amandus Benediktus Seran Klau, “Masalah Sampah dan Budaya Pemiskinan”, *Jurnal Ledalero*, 16:2 (Ledalero: Desember 2017), hlm. 159.

⁷Sonny Keraf, *op.cit.* hlm. 13.

⁸*Ibid.*

- ⁹Paus Fransiskus, *Ensiklik Laudato Si Tentang Perawatan Rumah Kita Bersama*, Penerj. Martin Harun (Jakarta: Penerbit Obor, 2015), hlm. 1.
- ¹⁰ Sonny Keraf, *loc.cit.*
- ¹¹ Ibrahim, Dwi Haryad dan Nanang Wahyudin, *Politik Ekologi dan Pelajaran dari Kasus Timah Bangka Belitung* (Jogyakarta: Istana Media, 2019), hlm. 5-6.
- ¹² *Ibid.*, hlm. 7-8.
- ¹³Selu Margaretha Kushendrawati, “Masyarakat Konsumen sebagai Ciptaan Kapitalisme Global: Fenomena Budaya dalam Realitas Sosial” *Makara, Sosial Humaniora*, 10:2 (Jakarta: Desember 2006), hlm. 52.
- ¹⁴Paus Fransiskus, *op.cit.* hlm. 6.
- ¹⁵Frans Magnis-Suseno, “Teologi Pembebasan”, *Kompas* 18/09/ 1984.
- ¹⁶ Paus Fransiskus, *op.cit.* hlm.106.
- ¹⁷ *Ibid.*, hlm. 136.
- ¹⁸ Sonny Keraf, *op.cit.* hlm. 18.
- ¹⁹ Paus Fransiskus, *op.cit.* hlm. 106.